



Analisis Peluang Dan Tantangan Perdagangan Produk Pertanian (Studi Kasus Pada Perdagangan Indonesia Dengan Republik Rakyat Tiongkok)

Analysis Of Opportunities And Challenges Of Agricultural Product Trade (Case Study On Indonesia's Trade With The People's Republic Of China)

Febby Ananda¹, Daspar²

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa

Email: febbyanandaa@gmail.com¹, daspar@pelitabangsa.ac.id²

Article Info

Article history :

Received : 27-05-2025

Revised : 29-05-2025

Accepted : 31-05-2025

Published : 03-06-2025

Abstract

The trade of agricultural products between Indonesia and the People's Republic of Tiongkok has shown an upward trend, yet it still faces various structural challenges. The main issue addressed in this research is the identification of opportunities and challenges in Indonesia's agricultural trade, particularly in palm oil, within the framework of the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). This study aims to analyze the potential and barriers Indonesia encounters in expanding its agricultural market access to Tiongkok. A descriptive quantitative method was employed, using a literature study and secondary data analysis obtained from Statistics Indonesia (BPS), the Ministry of Trade, and international institutions such as the WTO. Data were analyzed through export trend tabulations, visual charts, and detailed narrative explanation. The findings reveal that although the agricultural sector contributes a relatively small portion of Indonesia's total exports to Tiongkok, it holds significant potential for development through quality improvement, downstream product innovation, and more adaptive and progressive economic diplomacy strategies. This means that increasing competitiveness and product innovation are very important to navigate global market fluctuations and optimize the benefits of bilateral trade cooperation between Indonesia and Tiongkok.

Keywords: *agricultural trade, palm oil, Indonesian exports, ACFTA*

Abstrak

Perdagangan produk pertanian antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menunjukkan tren yang meningkat, namun masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peluang dan tantangan perdagangan produk pertanian Indonesia, khususnya kelapa sawit, dalam konteks kerja sama perdagangan bebas ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi yang dimiliki serta hambatan yang dihadapi Indonesia dalam memperluas akses pasar produk pertaniannya ke Tiongkok. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Perdagangan, serta organisasi internasional seperti WTO. Data dianalisis melalui tabulasi tren ekspor, grafik visual, dan uraian naratif yang mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kontribusi sektor pertanian terhadap total ekspor Indonesia ke Tiongkok relatif kecil, sektor ini memiliki peluang besar untuk berkembang melalui peningkatan kualitas produk, penguatan hilirisasi, serta strategi diplomasi ekonomi yang lebih adaptif dan progresif. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan daya saing dan inovasi produk merupakan kunci dalam menghadapi fluktuasi pasar global serta mengoptimalkan manfaat kerja sama perdagangan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok.

Kata kunci: *perdagangan pertanian, ekspor Indonesia, ACFTA*



PENDAHULUAN

Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama sejak diberlakukannya kerangka kerja sama *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* pada tahun 2010. Perjanjian ini telah menciptakan dasar yang kuat bagi peningkatan perdagangan barang, jasa, dan investasi antara kedua negara. Dalam konteks sektor pertanian, ACFTA memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mengeksport komoditas unggulannya seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao ke pasar Tiongkok yang sangat besar. Bahkan, Tiongkok telah menjadi salah satu pasar utama produk pertanian ASEAN, dengan proyeksi impor yang meningkat hingga 200% dalam lima tahun mendatang (Saphira et al., 2022).

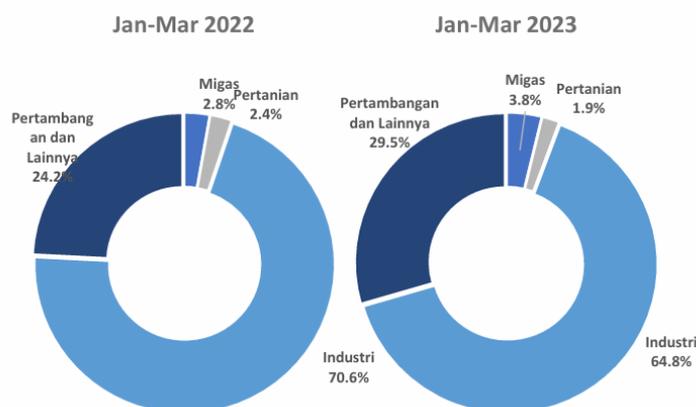
Perdagangan komoditas pertanian Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika liberalisasi perdagangan global, khususnya setelah Indonesia meratifikasi pembentukan *World Trade Organization (WTO)* melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Ratifikasi ini membawa Indonesia pada kewajiban untuk mematuhi ketentuan dalam *Agreement on Agriculture (AoA)*, yang mencakup tiga pilar utama: akses pasar, subsidi domestik, dan subsidi ekspor. Namun, negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan ketentuan tersebut, terutama karena lemahnya posisi tawar menawar dalam perundingan dan ketimpangan perlakuan dagang dari negara maju yang masih mempertahankan tingkat proteksi dan subsidi yang tinggi terhadap sektor pertanian mereka. Akibatnya, produk pertanian dari negara-negara berkembang cenderung tidak kompetitif di pasar global, sementara pasar domestik mereka justru dibanjiri oleh produk impor yang disubsidi, memperburuk kesejahteraan petani lokal (Malian, 2004). Situasi ini diperparah oleh liberalisasi ekonomi pasca-krisis 1998 yang mendorong lonjakan impor pangan strategis seperti beras, jagung, kedelai, dan gula. Ketergantungan impor yang meningkat berdampak langsung pada meningkatnya kemiskinan petani dan terganggunya stabilitas sektor pertanian nasional. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia perlu menyusun kebijakan yang seimbang antara proteksi terhadap komoditas substitusi impor dan promosi terhadap komoditas ekspor. Perlindungan terhadap beras dan kedelai, misalnya, harus dibarengi dengan pemberian subsidi pupuk atau insentif harga dasar, sementara komoditas ekspor seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan coklat perlu didorong melalui penguatan daya saing dan penciptaan pasar baru. Strategi ini menempatkan pertanian tidak hanya sebagai sektor penyedia pangan, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam kancah perdagangan global.

Data dari Kementerian Perdagangan (2023) menunjukkan bahwa pada kuartal I 2023, Indonesia berhasil membalik defisit tersebut menjadi surplus sebesar USD 1,24 miliar. Ekspor utama Indonesia ke Tiongkok didominasi oleh bahan bakar mineral, besi dan baja, serta minyak nabati seperti kelapa sawit. Sektor industri menyumbang 64,8% dari total ekspor ke Tiongkok, sementara sektor pertanian hanya 1,9%, meski menunjukkan pertumbuhan positif. Hal ini menjadi indikasi bahwa sawit sebagai produk turunan pertanian memiliki peluang besar untuk didorong lebih kompetitif. Fluktuasi harga global masih menjadi tantangan. Meskipun volume ekspor meningkat pada 2023, nilai ekspor justru menurun sebesar 19,29% menjadi USD 24,01 miliar, dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai USD 29,75 miliar. Penurunan ini menunjukkan pentingnya inovasi hilirisasi produk sawit dan perlunya kebijakan yang adaptif dalam menghadapi pasar global. Sebagai produsen utama dunia, Indonesia dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada



volume ekspor, tetapi juga pada kualitas, nilai tambah, dan keberlanjutan industri sawit secara menyeluruh

Struktur Ekspor Indonesia ke Republik Rakyat Tiongkok (Periode Januari – Maret 2022 dan Januari – Maret 2023)



Sumber: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Dari data tersebut struktur ekspor Indonesia ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada kuartal pertama tahun 2022 dan 2023 menunjukkan komposisi yang relatif konsisten, dengan dominasi yang sangat kuat oleh sektor industri. Pada periode Januari–Maret 2022, sektor industri menyumbang 70,6% dari total ekspor Indonesia ke Tiongkok. Sektor pertambangan dan lainnya berada di posisi kedua dengan 24,2%, sedangkan sektor migas dan pertanian masing-masing menyumbang 2,8% dan 2,4% dari total ekspor. Sektor pertanian dalam struktur ekspor Indonesia ke Tiongkok menunjukkan penurunan kontribusi pada kuartal I 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Januari–Maret 2022, sektor pertanian menyumbang 2,4% dari total ekspor, namun turun menjadi 1,9% pada periode yang sama tahun 2023. Meskipun secara nominal nilai ekspor pertanian tetap tumbuh, posisinya terhadap keseluruhan ekspor melemah akibat meningkatnya ekspor dari sektor lain seperti pertambangan dan migas. Penurunan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi sektor pertanian dalam meningkatkan daya saing, nilai tambah, dan memenuhi standar pasar Tiongkok.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode analisis sekunder, yang bertujuan untuk mengkaji perkembangan dan hubungan perdagangan pertanian antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Tujuan dari metode ini adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengekspor produk pertanian ke pasar Tiongkok, baik dari sisi struktural, kebijakan, maupun daya saing komoditas. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai sumber resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perdagangan, *World Trade Organization* (WTO), jurnal ilmiah, laporan pemerintah, serta publikasi lembaga riset nasional dan internasional. Data tersebut mencakup statistik ekspor-impor produk pertanian, tarif dan hambatan perdagangan, serta data perdagangan bilateral Indonesia–Tiongkok selama lima tahun terakhir. Analisis data dilakukan melalui tabulasi tren,



analisis deskriptif, dan visualisasi grafik untuk melihat hubungan antara variabel-variabel utama seperti peluang dan tantangan dalam perdagangan bilateral Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok. Selain itu, peneliti juga membandingkan data perdagangan internasional dalam satu dekade terakhir untuk mengamati fluktuasi dan potensi pasar ekspor strategis.

PEMBAHASAN

1. Peluang Perdagangan Produk Pertanian

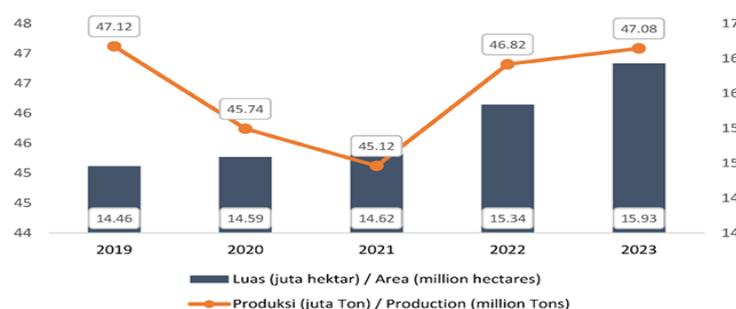
Perjanjian *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) telah membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas pasar ekspor produk pertanian ke Tiongkok. Sejak implementasi ACFTA pada tahun 2010, nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok mengalami peningkatan signifikan, khususnya untuk komoditas seperti minyak kelapa sawit, kopi, dan produk hortikultura. Hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok dalam bidang pertanian juga semakin erat melalui berbagai kesepakatan strategis, seperti pertukaran teknologi, pengembangan tanaman komersial, dan keamanan pangan. Kerja sama ini telah memberikan dampak positif berupa meningkatnya volume ekspor pertanian Indonesia ke Tiongkok, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok pangan tropis utama di kawasan (Saphira et al., 2022).

Indonesia merupakan negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, dengan luas lahan perkebunan sawit mencapai 15,93 juta hektar pada tahun 2023 dan produksi mencapai 47,08 juta ton per tahun. Produksi minyak sawit (CPO) terbesar tahun 2023 berasal dari Provinsi Riau dengan produksi sebesar 9,22 juta ton atau sekitar 19,59% dari total produksi Indonesia. Tiongkok dan India menjadi dua pasar terbesar dengan nilai ekspor masing-masing USD 4,62 miliar dan USD 3,70 miliar pada tahun 2019 (Patone et al., 2020). Seiring dengan meningkatnya peran ekspor dalam perekonomian nasional, Indonesia juga memperluas kerja sama ekonomi dan perdagangan melalui *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA). Sejak diberlakukan pada 2010, ACFTA telah meningkatkan perdagangan Indonesia-Tiongkok secara signifikan, dengan volume ekspor Indonesia ke Tiongkok meningkat dari USD 17,61 miliar tahun 2014 menjadi USD 31,78 miliar pada 2020 (Saphira, Sumadinata, & Yulianti, 2022). Sektor pertanian pun menjadi fokus penting dalam kerjasama ini, mencakup pengembangan komoditas, teknologi, hingga keamanan pangan. Industri kelapa sawit di Indonesia terus menunjukkan peran vitalnya sebagai penggerak ekonomi nasional. Data terbaru dari BPS (2024) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, luas perkebunan kelapa sawit mencapai 15,93 juta hektar, meningkat dari 14,68 juta hektar pada tahun 2019. Perkebunan besar swasta menguasai sekitar 54,08%, diikuti oleh perkebunan rakyat (42,29%) dan sisanya oleh perkebunan besar negara (3,63%). Produksi minyak sawit mentah (CPO) pada tahun 2023 tercatat sebesar 47,08 juta ton, dengan Provinsi Riau sebagai penyumbang tertinggi, yaitu 9,22 juta ton atau 19,59% dari total nasional (Statistik, 2024).



Luas Area dan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia

(Tahun 2019 – 2023)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Selama periode 2019 hingga 2023. Data menunjukkan bahwa luas perkebunan kelapa sawit mengalami pertumbuhan yang stabil dari tahun ke tahun, sementara produksi mengalami fluktuasi sebelum kembali meningkat di akhir periode. Pada tahun 2019, luas areal kelapa sawit tercatat sebesar 14,46 juta hektar, dan produksi mencapai 47,12 juta ton. Tahun berikutnya, meskipun terjadi sedikit peningkatan luas areal menjadi 14,59 juta hektar, produksi menurun ke angka 45,74 juta ton. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2021, ketika luas areal hanya naik tipis menjadi 14,62 juta hektar, namun produksi anjlok ke titik terendah selama lima tahun, yaitu 45,12 juta ton. Tren mulai membaik pada tahun 2022, ditandai dengan kenaikan luas areal menjadi 15,34 juta hektar dan peningkatan produksi secara signifikan menjadi 46,82 juta ton. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2023, di mana luas perkebunan sawit mencapai puncaknya di 15,93 juta hektar, dan produksi kembali stabil di angka 47,08 juta ton, hampir menyamai capaian pada 2019 (Statistik, 2024).

Potensi perdagangan pertanian Indonesia ke Tiongkok tidak hanya terbatas pada ekspor bahan mentah, tetapi juga terbuka untuk produk olahan bernilai tambah tinggi. Indonesia memiliki peluang besar untuk mengembangkan ekspor produk agrikultur berbasis teknologi dan sertifikasi mutu, mengingat konsumen Tiongkok semakin sadar akan kualitas dan keberlanjutan produk. Transfer teknologi pertanian serta peningkatan standar kualitas ekspor menjadi kunci dalam memanfaatkan sepenuhnya pasar Tiongkok yang terus berkembang. Untuk itu, dukungan pemerintah dalam bentuk pelatihan petani, fasilitasi ekspor, dan promosi perdagangan sangat dibutuhkan agar peluang ini dapat direalisasikan secara optimal (Simanungkalit, 2016).

2. Ancaman dan Tantangan

Hubungan perdagangan Indonesia – Republik Rakyat Tiongkok dalam sektor pertanian selain memberikan peluang besar, tetap terdapat berbagai ancaman struktural yang perlu diwaspadai. Salah satu tantangan utama adalah ketergantungan yang tinggi terhadap komoditas primer, seperti kelapa sawit dan karet, yang cenderung memiliki nilai tambah rendah. Hal ini menyebabkan posisi tawar Indonesia dalam rantai pasok global menjadi lemah, terutama ketika harga komoditas dunia mengalami fluktuasi. Selain itu, produk pertanian Indonesia umumnya belum memiliki keunggulan kompetitif dari sisi teknologi dan efisiensi produksi bila dibandingkan dengan produk dari negara-negara pesaing di kawasan ASEAN seperti Thailand



dan Vietnam (Malian, 2004). Indonesia menghadapi tekanan akibat masuknya produk-produk pertanian murah dari Tiongkok ke pasar domestik. Implementasi ACFTA sejak 2010 memang menurunkan hambatan tarif, tetapi di sisi lain juga meningkatkan arus impor produk hortikultura dan pangan olahan dari Tiongkok. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di sektor pertanian lokal kesulitan bersaing dengan produk impor yang ditawarkan dengan harga lebih murah karena disubsidi oleh pemerintah Tiongkok. Akibatnya, sejumlah komoditas lokal mengalami penurunan daya saing dan mengancam kelangsungan produksi dalam negeri (Simanungkalit, 2016). Masalah lain yang menjadi tantangan serius adalah ketimpangan neraca perdagangan bilateral. Meski ekspor Indonesia ke Tiongkok meningkat, nilai impornya juga melonjak, terutama dari sektor pertanian olahan dan pangan segar. Ketidakseimbangan ini memperburuk neraca perdagangan Indonesia dan meningkatkan ketergantungan terhadap produk luar negeri. Bila tidak diantisipasi dengan strategi diversifikasi ekspor dan penguatan nilai tambah produk pertanian lokal, kondisi ini dapat merugikan petani dan industri kecil di dalam negeri (Saphira et al., 2022).

Kebijakan proteksi dan subsidi dari negara-negara maju, termasuk Tiongkok, sering kali tidak diimbangi dengan perlindungan yang sepadan di Indonesia. Dalam konteks WTO dan AoA, Indonesia memiliki ruang terbatas untuk memberikan subsidi atau dukungan harga terhadap petani karena keterbatasan fiskal dan kepatuhan terhadap perjanjian internasional. Akibatnya, petani Indonesia harus bersaing di pasar global tanpa perlindungan yang cukup, sementara produk dari negara lain menikmati subsidi ekspor dan insentif domestik yang besar (Malian, 2004). Selain tantangan eksternal, terdapat pula hambatan internal seperti rendahnya kualitas infrastruktur, logistik pertanian, dan lemahnya sistem sertifikasi mutu ekspor. Banyak petani belum memiliki akses terhadap pelatihan dan teknologi modern yang dibutuhkan untuk memenuhi standar ketat pasar Tiongkok, termasuk sertifikasi keamanan pangan dan ketertelusuran produk (traceability). Hal ini menghambat ekspansi produk pertanian Indonesia, khususnya dari usaha kecil dan menengah, ke pasar luar negeri. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi untuk membenahi ekosistem pertanian ekspor Indonesia secara menyeluruh (Dwijantoro et al., 2022).

3. Analisis Daya Saing

Daya saing produk pertanian Indonesia di pasar Tiongkok secara umum masih bertumpu pada komoditas unggulan berorientasi ekspor seperti kelapa sawit, karet, dan kelapa. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, defisit perdagangan tertinggi tercatat pada tahun 2018, yaitu sebesar -18.405,6 juta USD, dengan nilai ekspor sebesar 27.132,2 juta USD dan impor mencapai 45.537,8 juta USD. Komoditas lain seperti ubi kayu, pisang, dan kulit hewan berkontribusi dalam skala lebih kecil namun tetap mencerminkan potensi yang perlu dikembangkan. Dominasi kelapa sawit menandakan bahwa Indonesia masih memiliki keunggulan komparatif yang kuat dalam komoditas ini, meskipun dalam bentuk bahan mentah (Jamilah et al., 2018). Struktur ekspor yang sangat tergantung pada bahan baku mentah menjadi kendala dalam menciptakan daya saing yang berkelanjutan. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam melakukan diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah. Ketimpangan daya saing ini terlihat dari neraca perdagangan Indonesia–Tiongkok yang terus mengalami defisit. Produk industri pertanian Tiongkok yang lebih murah dan



berkualitas tinggi telah membanjiri pasar Indonesia, sedangkan ekspor Indonesia ke Tiongkok cenderung stagnan dan belum mampu bersaing pada produk olahan.

Neraca Perdagangan Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (Tahun 2018 – 2023)



Sumber: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Berdasarkan data tersebut pada periode Januari hingga Maret 2023, nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok tercatat sebesar USD 16,58 miliar, menunjukkan peningkatan sebesar 26,71% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sebaliknya, impor Indonesia dari Tiongkok selama periode tersebut justru mengalami penurunan sebesar 3,56%, dengan nilai sebesar USD 15,34 miliar. Kondisi ini menyebabkan neraca perdagangan Indonesia dengan Tiongkok mengalami surplus sebesar USD 1,24 miliar, yang merupakan perubahan signifikan dibandingkan dengan periode Januari–Maret 2022 yang masih mencatat defisit sebesar USD 2,82 miliar.

Dalam upaya meningkatkan daya saing, kebijakan tarif dan skema proteksi menjadi salah satu strategi yang relevan. Penelitian dengan pendekatan model *GTAP (Global Trade Analysis Project)* menunjukkan bahwa kebijakan tarif impor 7,5% terhadap produk pertanian dapat meningkatkan PDB, kesejahteraan, dan *terms of trade* Indonesia. Sebaliknya, skenario nol tarif akan meningkatkan volume perdagangan tetapi melemahkan posisi sektor pertanian domestik secara struktural. Oleh karena itu, pilihan kebijakan sangat bergantung pada prioritas nasional antara pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan pembangunan pertanian jangka Panjang (Kartini & Margaret, 2020). Selain dukungan kebijakan, peningkatan daya saing juga harus disertai dengan penguatan kualitas, sertifikasi, dan pengolahan produk pertanian. Tiongkok sebagai negara tujuan ekspor terbesar juga memiliki permintaan yang tinggi terhadap produk makanan olahan dan organik yang sehat dan ramah lingkungan. Dalam hal ini, Indonesia memiliki peluang untuk mengisi ceruk pasar melalui inovasi produk dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Optimalisasi kerja sama ACFTA serta skema *Local Currency Settlement (LCS)* juga dapat menekan biaya perdagangan dan mempercepat penetrasi pasar pertanian Indonesia di Tiongkok. Dengan memperkuat daya saing secara menyeluruh—baik melalui perlindungan pasar domestik, peningkatan kualitas produk, hingga efisiensi biaya logistik—Indonesia dapat mempertahankan bahkan memperluas pangsa pasarnya di Tiongkok. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani menjadi krusial dalam mewujudkan perdagangan pertanian yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jika hal ini dapat diwujudkan, produk pertanian Indonesia tidak hanya akan menjadi penopang ekonomi domestik, tetapi juga pemain utama dalam pasar global yang dinamis.



4. Peran Kebijakan dan Diplomasi Ekonomi

Kebijakan perdagangan dan diplomasi ekonomi memegang peran sentral dalam mendorong hubungan dagang Indonesia–Tiongkok, terutama dalam sektor pertanian. Salah satu inisiatif penting adalah partisipasi Indonesia dalam skema *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA). Dalam praktiknya, diplomasi ekonomi Indonesia belum sepenuhnya optimal dalam melindungi kepentingan petani dan pelaku usaha kecil di sektor pertanian. Hal ini disebabkan oleh belum terintegrasinya kebijakan perdagangan dengan strategi peningkatan kapasitas produksi nasional. Akibatnya, meskipun akses pasar terbuka lebar, ekspor pertanian Indonesia masih didominasi oleh komoditas mentah seperti kelapa sawit dan karet. Sementara itu, Tiongkok lebih aktif memanfaatkan kerja sama ini untuk mengeksport produk olahan dan teknologi pertanian bernilai tinggi ke Indonesia, yang memperdalam defisit neraca perdagangan sektor pertanian.

Selain kebijakan moneter dan perdagangan, diplomasi teknis dalam bentuk kerja sama riset, teknologi, dan peningkatan kapasitas SDM pertanian juga perlu diperkuat. Indonesia dapat menjalin kemitraan strategis dengan lembaga pertanian dan agribisnis di Tiongkok untuk mempercepat transfer teknologi budidaya, pascapanen, dan pengolahan. Hal ini penting mengingat standar produk pangan Tiongkok sangat ketat, termasuk dalam aspek traceability dan keamanan pangan. Dengan diplomasi yang bersifat teknis dan sektoral ini, Indonesia dapat meningkatkan daya saing produknya sekaligus memperluas diversifikasi komoditas ekspor pertanian. Agar kebijakan perdagangan dan diplomasi ekonomi memberikan dampak nyata, diperlukan koordinasi lintas sektor antara kementerian, lembaga perdagangan, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Penguatan institusi ekspor, pemberian insentif untuk diversifikasi produk bernilai tambah, serta promosi dagang yang intensif di Tiongkok harus menjadi prioritas nasional. Diplomasi ekonomi harus diarahkan tidak hanya untuk membuka pasar, tetapi juga untuk memperjuangkan perlakuan adil dan mendorong posisi tawar Indonesia dalam setiap perundingan dagang. Dengan demikian, produk pertanian Indonesia dapat menjadi aktor utama dalam perdagangan global yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Perdagangan produk pertanian antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam satu dekade terakhir, terutama setelah implementasi *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA). Kerja sama ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menembus pasar pertanian Tiongkok yang sangat besar dan dinamis. Komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, kelapa, pisang, dan ubi kayu menjadi tulang punggung ekspor Indonesia ke Tiongkok. Selain itu, kebijakan bilateral seperti *Local Currency Settlement* (LCS) semakin memperkuat efisiensi dan kestabilan transaksi perdagangan antarnegara. Meskipun begitu, potensi besar ini belum dimanfaatkan secara optimal. Ekspor pertanian Indonesia ke Tiongkok masih didominasi oleh bahan mentah dengan nilai tambah rendah, sedangkan Tiongkok mengeksport produk industri olahan yang lebih kompetitif. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam neraca perdagangan dan memperlihatkan lemahnya daya saing sektor pertanian nasional. Tantangan lain yang dihadapi mencakup rendahnya kualitas dan konsistensi pasokan, keterbatasan infrastruktur logistik, serta belum optimalnya pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan internasional.



Peran kebijakan dan diplomasi ekonomi sangat krusial untuk mengatasi tantangan tersebut. Pemerintah perlu memperkuat perlindungan terhadap petani dan pelaku usaha lokal melalui insentif produksi, fasilitasi ekspor, serta promosi dagang yang lebih terarah. Diplomasi teknis juga harus ditingkatkan, termasuk kerja sama riset dan pengembangan teknologi pertanian dengan mitra di Tiongkok. Selain itu, kebijakan perdagangan harus mampu mengakomodasi kebutuhan domestik dan ekspor secara seimbang, dengan memastikan sektor pertanian tetap menjadi prioritas pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwijantoro, R., Dwi, B., & Syarief, N. (2022). Pengaruh Harga, Kualitas Produk, Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Marketplace Shopee. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(2), 63. <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.162.392>
- Jamilah, J., Sinaga, B. M., Tambunan, M., & Hakim, D. B. (2018). Dampak Perlambatan Ekonomi China Dan Devaluasi Yuan Terhadap Kinerja Perdagangan Pertanian Indonesia. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 20(3), 325–345. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i3.61>
- Kartini, K., & Margaret, S. (2020). Dampak Kebijakan Tarif terhadap Sektor Pertanian di Indonesia: Analisis Model Global Trade Analysis Project (GTAP). *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 10(1), 25–41. <https://doi.org/10.52813/jei.v10i1.64>
- Malian, A. H. (2004). Kebijakan Perdagangan Internasional Komoditas Pertanian Indonesia. *Akp*, 2(2), 135–156.
- Patone, C. D., Kumaat, R. J., & Mandej, D. (2020). Analisis Daya Saing Ekspor Sawit Indonesia Ke Negara Tujuan Ekspor Tiongkok Dan India. *Jurnal Berkah Ilmiah Efisiensi*, 20(3), 22–32. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/30423>
- Saphira, K., Sumadinata, R. W. S., & Yulianti, D. (2022). Kerja Sama Pertanian Indonesia dengan China dalam Kerangka AFCTA. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(2), 109. <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.38276>
- Simanungkalit, I. H. (2016). 濟無 No Title No Title No Title. 10, 1–23.
- Statistik, B. P. (2024). No Title. *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2023*. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/29/d5dcb42ab730df1be4339c34/statistik-kelapa-sawit-indonesia-2023.html>